Kebijakan ini berlaku untuk entitas pelaporan dan entitas akuntansi dalam menyusun laporan keuangan. Pada Peraturan Walikota Cimahi No.11 tahun 2009 tentang kebijakan akuntansi Pemerintah Daerah Kota Cimahi sudah baik dalam penyusunan laporan keuangannya karena sudah sesuai dengan peraturan yang ada.

2. Kualitas hasil laporan keuangan Pemerintah Daerah Kota Cimahi para pengguna perlu membandingkan laporan dari suatu entitas pelaporan dari waktu ke waktu untuk mengetahui *trend* posisi keuangan, kinerja, dan arus kas. Oleh karena itu, kebijakan akuntansi yang digunakan harus diterapkan secara konsisten pada setiap periode. Kebijakan akuntansi bisa menjadi signifikan walaupun nilai pos-pos yang disajikan dalam periode berjalan dan sebelumnya tidak material. Selain itu, perlu pula diungkapkan kebijakan akuntansi yang dipilih dan diterapkan yang tidak diatur dalam kebijakan ini. Pada kualitas laporan keuangan Pemerintah Daerah Kota Cimahi laporan keuangannya sudah sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan dan peraturan yang sudah ada. kualitas hasil laporan keuangannya sudah sangat sesuai dengan karakteristik kualitatif laporan keuangan pada laporan keuangan Pemerintah Daerah Kota Cimahi sudah dapat dibandingkan dengan laporan keuangan Pemerintah Daerah lain.

5.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah penulis buat, maka penulis dapat memberikan saran kepada Pemerintah Daerah Kota Cimahi yaitu sebagai berikut :

1. Berdasarkan hasil penelitian pada penerapan Peraturan Walikota Cimahi No.11 Tahun 2009, kebijakan akuntansi para pengguna perlu membandingkan laporan dari suatu entitas pelaporan dari waktu ke waktu untuk dapat mengetahui *trend* posisi keuangan, kinerja, dan arus kas, sebaiknya mengikuti Peraturan yang telah diberlakukan oleh Walikota Cimahi yang telah diterapkan pada tahun 2009. Sehingga kebijakan akuntansi akan sesuai dengan Peraturan Walikota Cimahi No.11 tahun 2009, dan para pengguna pun dapat memahami dengan apa yang disajikan pada kebijakan akuntansi. Pemerintah Daerah Kota Cimahi perlu memperhatikan kekurangan dari kebijakan akuntansi, oleh karena itu pemerintah daerah kota cimahi pada aset yang dibawah kapitalisasi agar dapat dikelompokan ke dalam pos neraca. Pemerintah Kota Cimahi juga harus dapat membahas secara rinci biaya perolehan aset tetap selain biaya modal, depresiasi penyusutan aktiva tetap harus dapat dilaksanakan, dan Walikota Cimahi agar dapat membuat kebijakan tentang layanan umum daerah, dan pada Peraturan Walikota Cimahi No.11 Tahun 2009 tentang kebijakan akuntansi mempunyai kelebihan yaitu setiap pos neraca sudah mempunyai standar yang tetap. Pemerintah Daerah Kota Cimahi pada Penerapan Peraturan Walikota Cimahi No.11 Tahun 2009 tentang Kebijakan Akuntansi pada pengakuan unsur laporan keuangan yaitu pada kemungkinan besar manfaat ekonomi masa depan terjadi

sudah sangat sesuai dengan penyusunan laporan keuangan di Pemerintah Daerah Kota Cimahi.

2. Berdasarkan hasil penelitian kualitas hasil laporan keuangan pada Bagian Keuangan, agar dapat membandingkan laporan keuangannya dari suatu entitas ke entitas lain, agar kebijakan akuntansi yang digunakan dapat diterapkan secara konsisten pada setiap periode. Pada kualitas hasil laporan keuangan Pemerintah Daerah Kota Cimahi laporan keuangannya sudah sesuai dengan SAP dan peraturan yang sudah ada. Pada laporan keuangannya sudah dapat dibandingkan dengan laporan keuangan Pemerintah Daerah lain, dan diharapkan agar Pemerintah Daerah Kota Cimahi dapat mempertahankan kualitas laporan keuangannya.